DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 H	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selama Undang-Undang Berlaku	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan (mengungkap data pribadi)	Melindungi Pegawai dari penyalahgunaan data
2	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa (25 tahun atau bisa diperpanjang)	Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian dan melindungi hak atas intelektual dan menjaga persaingan yang sehat
3	Kode akses/password aplikasi elektronik	UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selama password/kode berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga meminimalisir pembajakan data
4	SPJ, SPM, SPP, SP2D	UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Masa pelaksanaan pekerjaan	Mengungkapkan data keuangan lembaga	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan
5	Rincian Anggaran Kegiatan	Permendagri No. 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selama tahun anggaran berjalan	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif/persepsi yang tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat sesuai perencanaan
6	Penataan Kinerja Pegawai	Perka BKN No. 37 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan PNS	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selama periode	Mengungkapkan data riwayat pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
7	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
8	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan tidak sehat	Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar
9	Penilaian kinerja/ prestasi kerja pegawai	PP No. 46 Tahun 2011 Tentang penilaian prestasi kerja PNS	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Bersifat terbuka dalam manajemen kepegawaian tetapi tidak untuk dipublikasikan	Mengungkap data pribadi, riwayat kepegawaian	Melindungi privasi pegawai

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
10	Surat penting bersifat rahasia, sangat rahasia dan konfidensial	Permenpan No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selesainya kepentingan surat tersebut	Menghambat kebijakan birokrasi	Menjaga data pemerintahan
11	Data identitas pelapor kejadian tidak baik	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Tidak terbatas	Terjadi konflik di masyarakat	Keamanan pelapor dilindungi
12	Dokumen pengadaan yang pelaksanaannya sedang berlangsung termasuk dokumen perencanaan dan pengawasan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 angka 3 huruf e	Bagian PBJ dan Adbang Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menjaga objektifitas proses evaluasi pemilihan pengadaan barang dan jasa

Madiun, 26 Januari 2023

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
dan Administrasi Pembangunan Kota Madiun

MALIK ASMANY, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690214 198903 1 005